

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontestasi kekuatan global saat ini sedang diwarnai kompetisi penyebaran pengaruh global oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Tatanan global yang sebelumnya banyak dikendalikan oleh Amerika Serikat dengan liberalismenya telah memberikan narasi terhadap Tiongkok sebagai antagonis dengan ideologi sosialismenya. Namun, pemerintahan Tiongkok modern berusaha untuk mengubah citra tersebut. Dengan memperhatikan dinamika dunia yang terjadi di era modern, Tiongkok kembali menegaskan keinginannya untuk menjadi kekuatan dominan global. Namun, Tiongkok berusaha untuk ‘bermain cantik’ dalam kompetisi kali ini, yakni dengan melakukan pendekatan dan upaya non-agresif, terlepas dari Perang Dagang yang terjadi dengan Amerika Serikat. Tidak hanya pada kompetisi ekonomi dan keamanan, Tiongkok juga melakukan berbagai pendekatan kultural untuk mendapatkan pengakuan sebagai kekuatan global. Pemerintah Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping melihat adanya prospek besar pada salah satu budaya yang mendunia, yaitu olahraga sepak bola yang menjadi hiburan masyarakat global.

Pilihan Xi Jinping pada sepak bola sebagai sasaran kultural untuk dikuasai tentu berdasarkan berbagai pertimbangan. Perlu diketahui bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak digemari dan ditonton oleh masyarakat dunia. FIFA World Cup atau yang dikenal sebagai Piala Dunia merupakan ajang pertandingan sepak bola tertinggi antar negara sedunia, perhelatan tersebut diselenggarakan tiap empat tahun sekali dan ditonton oleh hampir seluruh masyarakat dunia. Ajang Piala Dunia menjadi sumber kekuatan tersendiri, baik secara ekonomi maupun prestise. Piala Dunia berhasil menarik banyak sponsor dari perusahaan-perusahaan besar seperti Adidas, Coca-Cola, dan McDonald’s yang telah lama menjalin kerja sama dengan pihak FIFA (Fédération Internationale de Football Association) sebagai badan yang menaungi sepak bola internasional dan sebagai penyelenggara Piala Dunia (Becker 2018). Piala Dunia juga dapat menghasilkan keuntungan bagi negara penyelenggaranya melalui

sektor pariwisata, investasi stadion, hingga peningkatan arus sistem transportasi. Pemerintah Russia selaku penyelenggara Piala Dunia pada 2018 mengklaim memperoleh keuntungan sebesar \$26 milyar hingga \$31 milyar untuk ekonomi nasional (ESPN 2018).

Pada tahun 2022, Piala Dunia akan diselenggarakan di Qatar. Mengetahui hal tersebut, Tiongkok memandang adanya peluang besar untuk turut tergabung dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022, terlebih karena Qatar memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Peluang yang dimanfaatkan Tiongkok adalah pada pembangunan infrastruktur stadion sepak bola, yakni dengan menerapkan *stadium diplomacy*. Qatar selaku tuan rumah untuk Piala Dunia 2022 sedang membangun sebuah mega-proyek untuk fasilitas *venue*-nya. Qatar akan menjadi pelopor tuan rumah Piala Dunia yang akan menggunakan stadion berbasis ramah lingkungan, mulai dari pembangunan yang menggunakan material ramah lingkungan dan mengoptimalkan energi diperbaharui (Hayajneh, et al 2018). Dengan adanya *stadium diplomacy* yang dijalin antara Tiongkok dengan Qatar, Lusail Stadium sebagai stadion utama Piala Dunia 2022 yang dibangun hanya melalui kerja sama antara kontraktor Qatar, HBK Contracting dengan China Railway Construction Corporation (CRCC) dengan nilai hampir \$767 juta. Dari luas stadion, kompleks Lusail sebenarnya akan berbentuk kota kecil yang terdiri dari 19 distrik dan mampu menampung hingga 200.000 orang (Chadwick 2016).

Besarnya proyek yang sedang dijalin antara kedua negara tentu akan menjadi perhatian dunia. Untuk itu, Tiongkok juga sedang mengembangkan hal yang berkaitan dengan sepak bola. Hal tersebut diimplementasikan melalui beberapa kebijakan pemerintah Tiongkok yang secara masif membangun kualitas sepak bola nasionalnya. Sejak menjabat pada 2013, Presiden Xi Jinping menetapkan program reformasi dan pembangunan sepak bola Tiongkok sebagai salah satu prioritas pembangunan negara (Wu 2015). Ketertarikan Xi Jinping terhadap sepak bola telah ditunjukkan bahkan sebelum menjabat sebagai Presiden Tiongkok. Pada saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Xi Jinping memiliki tiga ambisi besar bagi sepak bola Tiongkok, yakni meloloskan Tiongkok ke Piala Dunia, menjadikan Tiongkok sebagai tuan rumah Piala Dunia, dan membawa

Tiongkok menjuarai kompetisi tersebut (Wan 2015). Pada Februari 2015, Xi Jinping merilis sebuah cetak biru yang memuat 50 poin tentang rencana jangka panjang program reformasi dan pembangunan sepak bola domestik (Fox Sports 2016). Semua ini menunjukkan keseriusan pemerintah Tiongkok untuk merebut perhatian global melalui sepak bola sebagai medianya.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah keuntungan yang diperoleh Tiongkok melalui *stadium diplomacy* dengan Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022?

1.3 Tinjauan Pustaka

Ada setidaknya tiga karya terdahulu yang tema kajiannya terkait kebijakan *stadium diplomacy* Tiongkok. Pertama karya Steve Menary (2015) yang berjudul “China’s programme of stadium diplomacy”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang *Stadium Diplomacy* yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok sejak sekitar tahun 1970. Penjelasan tersebut meliputi sejarah diterapkannya kebijakan tersebut pada negara-negara di kawasan Afrika hingga tujuan penerapan kebijakan tersebut. Contoh dari penelitian mengambil banyak dari kawasan Afrika karena menyesuaikan dengan data yang kebijakan tersebut berfokus pada pembangunan stadion di negara-negara Afrika. Terdapat tabel data penelitian menunjukkan bahwa kawasan Afrika memiliki 58 proyek stadion yang dibawah oleh pemerintah Tiongkok dan tersebar di 35 negara Afrika berbeda. Angka tersebut jauh diatas kawasan benua lain seperti Asia yang hanya terdapat 8 proyek stadion. Penelitian tidak menunjukkan adanya informasi terkait awal penerapan atau data pemerintahan Tiongkok tentang *Stadium Diplomacy*, namun terdapat data bahwa pembangunan dengan dasar ‘stadion persahabatan’ oleh Tiongkok pertamakali terdapat di Amaan Stadium di Zanzibar atau yang dikenal saat ini dengan Tanzania. Pembangunan tersebut selesai pada 1970 dengan pendanaan dan pembangunan sepenuhnya oleh pemerintah Tiongkok. Tujuan pembangunan stadion pada *Stadium Diplomacy* juga untuk menyaingi lawan dari Tiongkok, yakni Taiwan. Di Kosta Rika, Tiongkok membangun beberapa stadion untuk

menyaingi Taiwan yang lebih dulu diakui sebagai negara dan telah memberikan sejumlah bantuan dana.

Pada akhir penelitian, disebutkan bahwa Tiongkok memiliki keterkaitan besar dengan menggelar Piala Dunia selama hampir dua dekade upayanya. Namun tidak ditemukan adanya penjelasan terhadap upaya pemerintah Tiongkok untuk menjadi “sport powerhouse” dalam sepak bola dunia. Penelitian yang dilakukan Menary (2015) tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni pada penjelasan tentang *Stadium Diplomacy* dan tujuan dari penerapan kebijakan tersebut oleh pemerintah Tiongkok.

Penelitian kedua karya dari Hanna Winberg (2017) yang berjudul “The Image Game: An Explanatory Case Study on Soft Power as a Strategic Ulterior Motive in Chinese Football”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari adanya motif *soft power* dalam upaya pembangunan sepak bola Tiongkok dalam menjadi “sport powerhouse”. Pertanyaan penelitian tersebut adalah “Bagaimana upaya pembangunan sepak bola oleh pemerintah Tiongkok belakangan ini dapat dijelaskan dan dipahami melalui perspektif *soft power*?”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi kasus yang mengambil dari kasus pemerintah Tiongkok dan upaya *soft power*-nya pada sepak bola Tiongkok, namun hanya berfokus pada satu fenomena spesifik. Sumber empiris dari penelitian banyak berasal dari sumber sekunder seperti literatur akademik, buku, dan jurnal berita.

Hasil penelitian menunjukkan adanya relasi antara olahraga dengan politik secara umum dan sepak bola dengan Tiongkok secara spesifik. Terdapat beberapa indikator bahwa upaya *soft power* merupakan motif yang tersembunyi dari sepak bola Tiongkok. Terdapat pula adanya sisi positif bagi Tiongkok dalam membangun sepak bolanya dan menciptakan liga sepak bola yang terkenal. Hal tersebut kemudian mampu menjadi landasan dan daya saing dalam berpartisipasi pada kompetisi besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia. Namun penelitian tetap tidak menemukan bukti konkrit yang memiliki kebenaran mutlak, karena *soft power* merupakan sebuah konsepsi yang abstrak dan sebuah kekuatan dapat terpancang dari berbagai perspektif. Sehingga peneliti hanya menemukan relasi

antara sepak bola Tiongkok dengan *soft power* sebagai hal yang paling memungkinkan. Hubungan Chinese Super League dengan pemerintah Tiongkok juga menunjukkan bahwa sepak bola Tiongkok adalah sebagian dari *soft power* yang lebih besar dari pemerintah Tiongkok.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni tentang penjelasan upaya *soft power* Tiongkok melalui sepak bola. Walaupun penelitian yang telah penulis lakukan tidak menjadikan sepak bola sebagai subjek utama, perhelatan Piala Dunia Qatar pada 2022 merupakan salah satu agenda yang cukup diincar Tiongkok.

Karya ketiga oleh Brahim Saïdy (2017) yang berjudul “Qatar and Rising China: An Evolving Partnership”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara Qatar dan Tiongkok melalui tiga faktor utama. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang diajukan oleh Saïdy (2017), yang pertama adalah “Apa ruang lingkup dan signifikansi dari kerja sama diplomatis, ekonomi, dan militer antara Qatar dan Tiongkok?”. Pertanyaan kedua adalah “Apakah hubungan bilateral kedua negara mencerminkan dinamika baru dari kebijakan keamanan dan luar negeri Tiongkok di kawasan Teluk yang sekaligus mencerminkan persepsi Qatar pada sistem internasional?”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah eksplanatif, yakni menjelaskan hubungan antara Qatar dan Tiongkok melalui tiga faktor yang ditentukan oleh Saïdy (2017). Faktor-faktor tersebut adalah (1) Globalisasi, (2) Absennya pengaruh sisa kolonialisme dan prinsip non-intervensi, dan terakhir (3) Adanya nilai yang menghargai kedaulatan yang terkandung dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa hubungan antara Qatar dan Tiongkok telah terjalin dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga militer. Hubungan yang terjalin juga tidak terlepas dengan dinamika hubungan Tiongkok dengan negara-negara kawasan Teluk dan Timur Tengah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara Qatar dan Tiongkok diperkirakan akan semakin mendalam dan intens di waktu mendatang. Hal tersebut diakrenakan aspek-aspek kerja sama diplomatis dan ekonomi telah berjalan secara substansial dan telah terinstitusi dengan baik. Hasil tersebut akan

memberikan kontribusi pada kepentingan Tiongkok dalam kestabilan kawasan, yang diikuti juga dengan semakin pentingnya perkembangan perekonomian Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, Tiongkok juga sesuai dengan strategi perkembangan nasional Qatar yang lebih luas dengan cara bergantung secara mutual dengan kekuatan global yang sedang muncul. Di sisi lain, hubungan yang dijalin antara Qatar dengan Tiongkok juga memunculkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah keinginan dari Qatar dan juga dukungan negara-negara Teluk Arab untuk menginginkan Tiongkok menjadi anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut berkaitan dengan konflik-konflik yang banyak meletus di kawasan Timur Tengah, mulai dari potensi konflik di Iran, Palestina, hingga Suriah. Selain itu, upaya Tiongkok yang begitu jauh mendalam dengan Qatar dan kawasan Teluk juga turut memunculkan respon dari Amerika Serikat.

Karya-karya di atas membuka ruang bagi peneliti untuk melihat secara lebih spesifik dalam kasus Tiongkok dengan Qatar, apakah kebijakan *stadium diplomacy* Tiongkok dalam pembangunan *venue* Piala Dunia 2022 di Qatar merupakan bagian dari upaya Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya melalui kesan global positif yang diciptakan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan motif dari kebijakan Tiongkok untuk melakukan kerja sama dalam proyek Piala Dunia 2022 di Qatar, peneliti menggunakan setidaknya dua kerangka pemikiran yang keduanya berfungsi sebagai instrumen pengaruh yaitu bantuan luar negeri dan *soft power*.

1.4.1 Bantuan Luar Negeri sebagai Instrumen Pengaruh

Teori bantuan luar negeri secara politik diperkenalkan oleh Hans Morgenthau (1962) bersama dengan enam jenis bantuan luar negeri yang diajukan. Bantuan luar negeri secara definitif memiliki arti yang beragam. Hattori (2001) menjabarkan setidaknya ada tiga definisi dari bantuan luar negeri atau *foreign aid* berdasarkan pandangan yang mendasarinya. Pertama, realisme politik yang mengartikan bantuan luar negeri sebagai alat kebijakan yang berasal sejak

Perang Dingin dalam mempengaruhi keputusan politik dari penerima bantuan, mengingat pada saat itu kondisi dunia yang bipolar. Kedua, liberal institusionalisme yang memandang bantuan luar negeri sebagai perhitungan yang terprogram untuk meningkatkan perkembangan politik dan sosio-ekonomi dari negara penerima. Ketiga, pengikut teori *world system* yang mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai tujuan untuk mengekang dan membatasi jalan perkembangan dari negara penerima, yang juga mempromosikan adanya nilai kapital yang tidak imbang di dunia.

Hadirnya kebijakan berupa bantuan luar negeri telah memengaruhi banyak perkembangan dan pembangunan dunia sepanjang sejarah. Peranan bantuan luar negeri memegang peran penting dalam masa pasca Perang Dunia II, yakni berdampak signifikan pada perkembangan negara-negara dunia ketiga dan terbentuknya pembagian negara *North-South* hingga 1980 (Pankaj 2005). Bantuan luar negeri tertuju pada negara-negara yang demikian karena dapat mengatasi tiga kekurangan yang cenderung melanda negara-negara pasca Perang Dunia II, yakni kapital, kurs asing, dan pengetahuan teknis. Di sisi lain, Pankaj (2005) juga berpendapat bahwa kehadiran bantuan luar negeri juga turut memunculkan argumen-argumen pro-bantuan dan anti-bantuan. Sebagian besar negara di dunia telah terhubung dengan proses bantuan luar negeri, baik sebagai donor, penerima, ataupun keduanya. Negara menggunakan bantuan luar negeri sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Bantuan yang diberikan dapat ditarik oleh donor untuk memberikan dampak ketidakstabilan ekonomi untuk mengkacaukan pemerintahan yang secara relasi maupun ideologi menjadi antagonistik. Sebaliknya, bantuan juga dapat diberikan untuk mendukung dan mengapresiasi pemerintahan yang mampu kooperatif (Apodaca 2017).

Dari dimensi ekonomi global, hadirnya Bank Dunia dan IMF mendorong terciptanya globalisasi, liberalisasi, hingga privatisasi, sehingga perdagangan luar negeri dan FDI cukup menggeser pembahasan bantuan luar negeri dari dialog pembangunan global dan tatanan ekonomi global (Pankaj 2005). Walaupun demikian, arus bantuan luar negeri tetap menjadi bagian utama dari peralihan sumber antara negara maju dan negara berkembang. Secara teori, teori bantuan

luar negeri tidak dianggap sebagai sebuah teori yang independen dalam kajian perkembangan ekonomi sebagai induknya, melainkan dipandang sebagai bagian umum dari teori pertumbuhan ekonomi. Perdebatan antara teori bantuan luar negeri melalui perspektif kajian Hubungan Internasional dengan bantuan luar negeri secara turunan dari teori pertumbuhan ekonomi masih berlangsung hingga era modern saat ini. Namun korelasi antara bantuan luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi membentuk sebuah korelasi positif yang sama dipandang oleh kedua disiplin. Terdapat tiga pendekatan dasar dalam menjelaskan adanya korelasi positif antara bantuan luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi dari negara penerima, yakni pendekatan perselisihan tabungan-investasi, pendekatan pendapatan pertukaran asing-pengeluaran, dan pendekatan kapasitas serap kapital (Pankaj 2005).

Masih dalam dimensi ekonomi, bantuan luar negeri secara praktis dapat dimaksudkan sebagai tipe dari alokasi sumber daya – disamping dua maksud praktis lainnya yang dinyatakan oleh Hattori (2001). Alokasi sumber daya secara tipologi dikenalkan oleh akademisi antropologi asal Amerika Serikat, Marshall Sahlins, yang menyatakan bahwa terdapat tiga jenis alokasi sumber daya dalam lingkungan sosial: yakni pertukaran ekonomi, redistribusi, dan pemberian (Sahlins 1972 dalam Hattori 2001). Pertukaran ekonomi merujuk pada pertukaran barang atau jasa yang bersifat berkelanjutan maupun sukarela antara dua pihak dalam hubungan sosial, yang kemudian diakomodasi oleh pasar maupun institusi serupanya. Pada redistribusi, merupakan kontradiksi dari pertukaran ekonomi, yang merujuk pada alokasi sumber daya melalui otoritas sentral dengan standar-standar politik. Bentuk pemberian sebagai alokasi sumber merupakan yang paling berbeda dari kedua bentuk lainnya. Sebuah pemberian tidak terikat dari peraturan dan hukum yang mengikat. Selain itu, aktivitas dalam bentuk pemberian yang dapat bersifat sukarela akan terhindar dari maksud-maksud politik dan adanya bentuk-bentuk timbal balik.

1.4.2 *Soft Power* Sebagai Instrumen Pengaruh

Konsep *soft power* dikenalkan oleh Joseph S. Nye (1990) bersamaan dengan negasinya yakni *hard power*. Keduanya merupakan jenis dari kekuatan negara yang didefinisikan oleh Barnett dan Duvall (2005) sebagai kapabilitas negara dalam menggunakan sumber dayanya dalam membuat negara lain untuk tunduk dan melakukan hal yang diinginkan negara pemilik sumber daya. Namun, kekuatan atau *power* didefinisikan oleh Nye sebagai kepemilikan sumber daya tertentu untuk mampu mengarahkan pihak lain agar melakukan apa yang negara pemilik sumber daya inginkan, tanpa ada unsur paksaan.

Soft power dapat dipahami sebagai kekuatan yang bersifat laten dan tidak tampak secara langsung, namun dampaknya tetap dapat dirasakan. Sumber *soft power* dapat berasal dari sebuah *image* negara, seperti ideologi, kebijakan, hingga budaya yang sedang populer pada kalangan masyarakat dunia (Nye 1990). Penjelasan tersebut bertolakbelakang dengan konsep *hard power*, yang merupakan kekuatan yang tampak dan bersifat koersif, seperti kekuatan militer dan ekonomi sebuah negara. Pada era kontemporer saat ini, terdapat banyak pergeseran kekuatan negara dari *hard power* menuju *soft power*. Hal tersebut dikarenakan dinamika politik dunia kontemporer yang dahulunya banyak penggunaan *hard power* – seperti pada era Perang Dunia. Namun pada era pasca-perang saat ini, kekuatan militer tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan seperti pada era Perang Dunia, didukung juga dengan banyaknya kesadaran dan semangat perdamaian yang ditunjukkan oleh negara-negara dunia. Dinamika dunia juga menyebabkan adanya interdependensi antar negara, membuat kekuatan baru seperti nota diplomasi hingga perjanjian perdagangan menjadi lebih kuat, sehingga *soft power* menjadi jauh lebih berguna pada saat ini (Nye 1990).

Memahami dari teori *soft power* yang disampaikan Nye (1990), sebuah kekuatan atau *power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain untuk mencapai sebuah tujuan, yang dapat dilakukan dengan cara koersif, pembayaran, atau daya tarik. Nye juga kemudian mengkonsepkan bahwa tujuan sebuah aktor juga dapat dicapai melalui *seduction* yang juga sama-sama dapat mempengaruhi aktor lain, tanpa adanya *hard power* seperti tindak koersif maupun kekuatan

ekonomi. *Seduction* yang dimaksudkan Nye (2004) dijelaskan kemudian bahwa sebuah negara mampu mencapai tujuannya dalam politik internasional karena adanya rasa apresiasi dari negara lain. Apresiasi tersebut meliputi mengapresiasi nilai-nilai, menjadikan model contoh, hingga mencita-citakan kemakmurannya, sehingga mendorong negara-negara lain untuk mengikuti negara yang memiliki *soft power* tersebut (Junior & Rodrigues 2017).

Sebagai instrumen pengaruh, kebijakan sebuah negara untuk menggunakan dan atau meningkatkan *soft power* memiliki keterkaitan dengan *global information space* atau ruang informasi global. Globalisasi yang telah mendorong perkembangan teknologi informasi tentu semakin mempermudah penyebaran sebuah informasi, yang kemudian menciptakan adanya ruangnya sendiri untuk informasi yang dapat tersebar secara global. *Soft power* menjadi cukup signifikan untuk digunakan oleh negara dalam memanfaatkan ruang informasi global yang ada (Chong 2007). Selain dari kebutuhan informasi, *soft power* juga dapat berguna sebagai penyeimbang *hard power* sebuah negara. Wilson III (2008) memberikan sebuah contoh dari Pentagon yang menggunakan *soft power* untuk menyeimbangkan *hard power* yang dilakukan militer Amerika Serikat. Pentagon memiliki strategi OOTW (*other than war*) sebagai alternatif perang tradisional, hal tersebut dilakukan melalui cara peningkatan kompetensi kultural dan kemampuan berbahasa tentara Amerika Serikat sebelum terjun ke medan tempur. Upaya-upaya *soft power* tersebut juga tidak terlepas dari diplomasi publik yang dilakukan.

Sebuah negara dalam menggunakan *soft power* juga terpengaruhi dengan adanya masalah yang sedang terjadi. Isu-isu kontemporer seperti terorisme, migrasi, perubahan iklim, hingga munculnya penyakit-penyakit baru merupakan isu yang terdorong atas globalisasi dan perkembangan teknologi. *Soft power* menjadi sarana untuk menyebar pengaruh untuk membentuk koalisi global dalam menaggulangi isu-isu global tersebut, sekaligus menciptakan rasa hormat antar aktor-aktor internasional dalam dunia yang semakin multipolar. Pemahaman *soft power* yang demikian dijelaskan oleh Dubber (2015) sebagai “*permasalahan global membutuhkan solusi global*”. Oleh sebab itu, *soft power* merupakan salah

satu alat yang sesuai bagi sebuah negara untuk menghadapi permasalahan kontemporer pada era globalisasi, sehingga negara-negara akan terpengaruhi untuk mengembangkan *soft power*-nya untuk dapat *survive*.

1.5 Argumen Penelitian

Merujuk kerangka pemikiran di atas, penulis berargumen bahwa; melalui formula bantuan luar negeri, kebijakan *stadium diplomacy* yang dilakukan Tiongkok dengan Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022 tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi secara politik juga menjadi instrumen *soft power* yang mendukung upaya Tiongkok dalam menciptakan kesan global yang positif.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Stadium Diplomacy

Kebijakan lain dari Tiongkok yang penulis teliti adalah *Stadium Diplomacy* atau diplomasi stadion. Upaya tersebut telah dilakukan pemerintah Tiongkok sejak 1956, atau sejak rezim Mao Zedong. Diplomasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemberian bantuan luar negeri dalam bentuk pembangunan stadion yang ditujukan pada negara-negara di kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia, Karibia, hingga Pasifik Selatan (Will 2012). Pembangunan stadion yang diberikan terdapat dapat berupa sepenuhnya diberikan sebagai hibah, pinjaman dengan bunga rendah, atau pinjaman lunak. Pembangunan stadion yang dilakukan Tiongkok memiliki berbagai tujuan, seperti untuk pencarian pengakuan dari negara tujuan, sebagai sarana untuk melakukan perdagangan, hingga sebagai bentuk *soft power* dari Tiongkok. Hal tersebut menjadikan fokus utama dari *Stadium Diplomacy* tertuju pada negara-negara kawasan Afrika, mengingat negara kawasan Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah dan masyarakatnya yang memiliki antusiasme tinggi terhadap sepak bola (Menary 2015). *Stadium Diplomacy* yang sedang Tiongkok lakukan saat ini adalah pembangunan stadion yang nantinya akan digunakan untuk laga final Piala Dunia 2022 di Qatar. Hubungan Tiongkok dengan Qatar telah terjalin

dengan baik sejak dahulu, sehingga kerja sama dalam pembangunan infrastruktur untuk Piala Dunia 2022 menjadikan semangat tersendiri bagi kedua negara untuk menggeser panggung sepak bola dunia internasional menuju ke Asia, atau disebut dengan Asianisasi sepak bola (Chadwick 2016).

Upaya *Stadium Diplomacy* tersebut tidak lain merupakan cerminan dari sisi *soft power* Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan pembangunan-pembangunan stadion yang melalui pembiayaan tidak terlalu tampak secara kasat mata, namun efeknya dapat dirasakan – sesuai dengan pendapat Joseph Nye (1990), terutama *Stadium Diplomacy* yang dilakukan Tiongkok di negara-negara kawasan Afrika. *Stadium Diplomacy* terbukti sebagai *soft power* Tiongkok melalui banyaknya negara-negara kawasan Afrika yang mengakui Tiongkok dan akhirnya membangun relasi dengan Tiongkok (Will 2012).

1.6.1.2 Pembentukan Kesan Global Positif

Konsep kesan global atau *global image* menjadi salah satu fokus yang banyak dipelajari dalam disiplin ilmu komunikasi dan *public relations*. Dalam era globalisasi dan persebaran penggunaan sosial media, pemahaman akan kesan global menjadi lebih penting dan relevan dibandingkan aspek teritorial dan material dalam kompetisi ekonomi dan politik antar negara dalam sistem internasional (Buhmann 2016). Hal tersebut dikarenakan banyak hal-hal yang semakin mudah untuk diketahui dan diamati oleh publik, media, hingga organisasi internasional. Sehingga segala tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan negara-negara tertentu akan juga mudah untuk dinilai dan dibandingkan secara ekonomi, politik, hingga kebudayaannya. Adanya sebuah kesan global dapat mempengaruhi sebuah perkembangan negara. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep *soft power* milik Joseph S. Nye. Sebuah kesan global juga terbentuk atas perspektif masyarakat dan publik tertentu, sehingga bersifat konstruktif. Oleh sebab itu, kesan global dapat mempengaruhi sebuah bantuan langsung luar negeri, industri pariwisata, daya tarik pasar tenaga kerja, hingga sistem edukasi (Buhmann 2016). Sehingga kesan global menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan oleh negara pada era globalisasi saat ini.

Menurut Papadopoulos (dalam Jenes 2008), konsep kesan global mencakup hal-hal multidimensional, seperti perkembangan industri, orientasi industri, hingga hubungan dekat dengan aktor-aktor lain. Kesan global sebuah negara mencakup berbagai hal yang diproduksi dari negara tersebut, sehingga banyak terceminkan melalui produk, merk, hingga perusahaan. Dalam pembentukannya, sebuah kesan global dapat terbentuk secara sendirinya melalui pengalaman, opini, dan tentunya informasi, yang kemudian diterima oleh berbagai saluran atau *channel*. Saluran penerima kesan global antara lain adalah pelaku politik (internal maupun eksternal), telekomunikasi, hiburan (film dan musik), hingga rumor.

Dalam tulisan ini, pembentukan kesan global akan diarahkan menuju positif. Hal tersebut berkaitan dengan keberagaman kesan global yang dimiliki Tiongkok karena beberapa kebijakannya yang cenderung asertif. Pembentukan kesan global positif dapat dilakukan melalui pembentukan *soft power*, seperti mempromosikan nilai-nilai kebudayaan hingga keterbukaan atas kebudayaan lain. Kesan global yang positif juga dapat dihasilkan melalui upaya keikutsertaan dengan *mainstream* yang sedang beredar secara global. Dalam konteks tulisan ini, *mainstream* yang diambil oleh pemerintah Tiongkok adalah pada aspek olahraga, terutama sepak bola. Sebagai salah satu olahraga yang paling banyak digemari oleh penduduk dunia, Tiongkok memandang adanya prospek *soft power* dalam sepak bola untuk menghasilkan kesan global positif. Sehingga Tiongkok juga merencanakan untuk turut terlibat dalam perhelatan kejuaraan dunia sepak bola yakni Piala Dunia, baik menyelenggarakan, berpartisipasi, hingga menjuarainya.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif, dengan metode kualitatif. Tipe penelitian eksplanatif tersebut bertujuan untuk memahami fenomena dan mencari penjelasan sebab dan akibat dari sebuah fenomena.

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah upaya *Stadium Diplomacy* Tiongkok serta upaya pembangunan dan pengembangan sepak bola oleh

pemerintah Tiongkok yang tertuju pada kompetisi Piala Dunia. Penelitian ini juga memiliki jangkauan dari tahun 2016 hingga 2019. Penulis memilih tahun 2016 karena pada tahun tersebut Tiongkok menandatangani kerja sama dengan Qatar dalam membangun stadion untuk Piala Dunia 2022. Sedangkan tahun 2019 merupakan tahun ketika pemimpin kedua negara bertemu lagi untuk membahas kerja sama strategis.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan didapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui pernyataan resmi pemerintah Qatar yang dikumpulkan melalui situs resminya hingga situs resmi kontraktor Tiongkok selaku pembangun stadion dari salah satu *Stadium Diplomacy*. Sumber sekunder bersal dari buku, jurnal, surat kabar, internet, serta hasil survei dan penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab kedua membahas kebijakan *stadium diplomacy* antara Tiongkok dengan Qatar. Bab ketiga menyajikan upaya-upaya Tiongkok dalam membangun kesan global yang positif. Bab keempat berisi tentang analisis kesan global positif dan keuntungan ekonomi yang diperoleh Tiongkok. Bab kelima kesimpulan.